

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
SANKSI, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PPh 21**

(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

YUKHA ILAIYYAH

NIM 1505046015

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Yukha Ilaiyah

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Yukha Ilaiyah

NIM : 1505046015

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perjakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Juli 2019

Pembimbing I



Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II



Fajar Aditwa, S. Pd., MM

NIP. 19891009 201503 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Yukha Ilaiyah
NIM : 1505046015
Judul : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus)

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Baik, pada tanggal :


30 Juli 2019

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu akuntansi syariah tahun akademik 2019/2020.


Semarang, 2 Agustus 2019

Mengetahui,


Ketua Sidang,


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 197004101995031001


Sekretaris Sidang,


Ida Nur Laili, M.Ag.
NIP. 197811132009012004


Penguji I,


Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

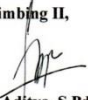
Penguji II,


Drs. Muhlis, M.Si.
NIP. 196101171988031002

Pembimbing I,


Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Pembimbing II,


Fajar Aditva, S.Pd., MM.
NIP. 198910092015031003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Yang telah bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yukha Ilaiyyah
Nim : 1505046015
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus)

Semarang, 26 Juli 2019

Deklarator



Yukha Ilaiyyah

NIM. 1505046015

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus di salin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu di tetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ‘	د = d	ض = dl	ك = k
ب = b	ذ = dz	ط = th	ل = l
ت = t	ر = r	ظ = zh	م = m
ث = ts	ز = z	ع = ‘	ن = n
ج = j	س = s	غ = gh	و = w
ح = h	ش = sy	ف = f	ه = h
خ = kh	ص = sh	ق = q	ي = y

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

C. Diftong

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan Ya	AY	A dan Y
أَوّ	Fathah dan Wawu	AW	A dan W

D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah*di lambangkan dengan konsonan ganda.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* *Al-* di tulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap *Ta' Marbuthah* di tulis dengan huruf “h”.

MOTTO

“Pajak itu diambil dari warga masyarakat yang mempunya untuk kemaslahatan mereka yang tak mempunya.”

(HR Bukhori-Muslim)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta kesempatan dan keridhoanNya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam juga saya sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Dengan terselesaikannya tulisan skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan ibu ku tercinta, yang selalu mendoakan dan menuntun setiap langkahku.
2. Kakak kandungku tersayang, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. *Spesial person*, Joko Shofian, yang selalu memberikan semangat dan menghiburku.
4. Anak-anak kos B1 Perumahan Bank Niaga lantai 2, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
5. Sahabat terkasihku (Rahma, Anis, Samroh, Arina, Farida, Zanuba, Saftri) yang memberikanku semangat dan selalu mendoakan yang terbaik untukku.
6. Teman-teman seperjuangan AKS 15, yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang yang tulus dan tidak ternilai harganya.
7. Teman hidup selama 45 hari (KKN Posko 55), yang telah memberikan semangat dan memberikan banyak pengalaman.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pph 21. Objek penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dibantu dengan aplikasi SPSS.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda hasil dari penelitian ini adalah variabel tingkat pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh positif sebesar 0,209 dan signifikan signifikan sebesar 0,019 terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi (X2) berpengaruh positif sebesar 0,305 dan signifikan sebesar 0,000 terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel religiusitas (X3) berpengaruh positif sebesar 0,244 dan signifikan sebesar 0,007 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi Jenjang Strata 1 (S-1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Dr. Ratno Agriyanto, S.Pd., M.Si., Akt., CA., CPAI., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Warno, S.E.,M.Si. selaku sekretaris jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. H. Muchammad Fauzi, S.E., MM. selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi.
5. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku pembimbing I yang senantiasa selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Fajar Aditya, S. Pd., MM. selaku pembimbing II yang senantiasa selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongoyang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bernadette N.D. Prananingrum selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan AKS A yang telah menemani sejak awal perkuliahan sampai saat ini.

10. Teman-teman seperjuangan jurusan akuntansi syariah yang telah memberikan motivasi dan pengalaman berharga.

Semoga semua amal baik mereka dicatat oleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis mudah-mudahan apa yang terkandung didalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Juli 2019

Penulis

Yukha Ilaiyyah
NIM 1505046015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
DEKLARASI	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	13
2.1.1.1. Teori Gaya Pikul	13

2.1.1.2. Teori Asuransi	14
2.1.1.3 Teori Kepentingan.....	14
2.1.1.4. Teori Bakti	14
2.1.1.5. Teori Asas Daya Beli	15
2.1.1.6 Pengertian Pajak.....	15
2.1.1.7 Peranan Pajak	17
2.1.1.8 Jenis-Jenis Pajak.....	18
2.1.1.9 Subjek Dan Objek Pajak	19
2.1.1.10 Tata Cara Pemungutan Pajak	21
2.1.1.11 Tarif Pajak.....	24
2.2. Pengetahuan Pajak.....	25
2.3. Sanksi Pajak.....	27
2.4. Religiusitas	28
2.5. Kepatuhan Pajak	30
2.6. Pajak Dalam Perspektif Islam.....	31
2.7. Penelitian Terdahulu.....	36
2.8. Kerangka Penelitian.....	45
2.9. Hiptesis Penelitian	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	49
3.1. Jenis Penelitian	49
3.2. Sumber Data	49
3.3. Populasi dan Sampel.....	49
3.4. Teknik Pengumpulan Data	52
3.5. Definisi Operasional Variabel	52
3.6. Teknik Analisis Data	54

3.6. 1. Statistik Deskriptif	54
3.7. Uji Reliabelitas Dan Validitas	55
3.7.1. Uji Reliabilitas	55
3.7.2. Uji Validitas	55
3.8. Uji Asumsi Klasik	56
3.8.1. Uji Normalitas	56
3.8.2. Uji Multi Kolonieritas	56
3.8.3. Uji Heterokedastisitas	57
3.9. Uji Hipotesis.....	57
3.9.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
3.9.2. Koefisien Determinasi (R^2)	57
3.9.3. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)	59
3.9.4. Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	59
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus	60
4.1.2. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus	61
4.1.3 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.....	61
4.1.4. Tujuan	61
4.1.5. Wilayah Kerja	62
4.1.6. Tugas Dan Fungsi.....	62
4.1.7. Mandat Yang Diberikan Kepada Instansi	66
4.1.8. Sumber Penerimaan Pajak.....	67

4.1.9 Gambaran Umum Responden	67
4.1.9.1 Jenis Kelamin Responden	67
4.1.9.2. Umur Responden.....	68
4.1.9.3. Tingkat Pendidikan Responden.....	69
4.2. Analisis Statistik Deskriptif.....	69
4.3. Uji Validitas Dan Reliabelitas	71
4.3.1. Uji Validitas	71
4.3.2. Uji Reliabelitas	73
4.4 Uji Asumsi Klasik	74
4.4.1. Uji Normalitas	74
4.4.1.1. Uji Normalitas Pendekatan Histogram.....	74
4.4.1.2. Uji Normalitas Pendekatan Plot	76
4.4.1.3. Uji Normalitas Pendekatan Kolmogorov	77
4.4.2. Uji Multikolonieritas	78
4.4.3. Uji Heterokedastisitas.....	80
4.4.3.1. Uji Heteroskedastisitas Dengan Menggunakan Scatterplot.....	80
4.4.3.2. Uji Hetero Dengan Menggunakan Uji Glejser	82
4.5. Uji Regresi Linear Berganda	83
4.6. Pengujian Hipotesis	86
4.6.1. Uji Koefisiensi Determisi (R^2)	86
4.6.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	87
4.6.3. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)	88
4.7. Pembahasan Hasil Penelitian.....	90

4.7.1. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	91
4.7.2. Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	92
4.7.3. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	94
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Keterbatasan Penelitian	96
5.3 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak	6
Tabel 2.1 Tarif Progresif	25
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Indikator Variabel	34
Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	68
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden	69
Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	70
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	72
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	73
Tabel 4.7 Uji Kolmogorov-Smirnov	77
Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas	78
Tabel 4.9 Uji Glejser	82
Tabel 4.10 Uji Koefisien Regresi Berganda	84
Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	87
Tabel 4.12 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	88
Tabel 4.13 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	89

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Normalitas Pendekatan Histogram	75
Grafik 4.2 Normalitas Pendekatan Plot	76
Grafik 4.2 Grafik Scatterplot	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	29
-------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	70
Lampiran 2 Dokumentas	75
Lampiran 3 Jawaban Responden Terhadap Masing-Masing Item Pernyataan	76
Lampiran 4 Uji Validitas Dan Reliabelitas	84
Lampiran 5 Karakteristik Responden	88
Lampiran 6 An Uji Asumsi Klasik	89
Lampiran 7 Alisis Statistik Deskriptif	90
Lampiran 8 Pengujian Hipotesis	93
Lampiran 9 Surat Jawaban Izin Penelitian dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus	94
Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran penting dalam sumber penerimaan negara, karena pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Pajak sendiri banyak memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi di Indonesia dan sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional. Sumber utama penerimaan negara yang terutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar berasal dari pajak. Pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Banyak usaha-usaha yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Seperti sensus pajak yang diharapkan semua Wajib Pajak pribadi maupun badan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat segera melaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sistem perpajakan dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial ekonomi. Ada beberapa jenis pemungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM),

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain.¹

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk mengayomi rakyatnya, baik dari segi kesejahteraan, keamanan, dan ketahanan masyarakat. Salah satu kepentingan rakyat jika ditinjau dari segi kesejahteraan yaitu masyarakat ingin hidup makmur dan semua kebutuhan tercukupkan. Dalam hal ini pemerintah sangat diharapkan dapat membantu terwujudnya kepentingan tersebut. Untuk memenuhi kepentingan ini, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian mengenai sumber pendapatan pemerintah agar bisa didapatkan informasi yang akurat sehingga dapat dijadikan bahan masukan yang bersifat membangun untuk alokasi dana pemerintah.

Peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun diharapkan pajak mampu memenuhi kebutuhan dalam pembangunan negara serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi, dengan demikian kesejahteraan rakyat Indonesia akan semakin meningkat dan tidak tertinggal dengan negara lain. Begitu besarnya peran pajak dalam pembangunan negara, pemerintah sudah seharusnya

¹Hanifatun Fahmi, *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan”* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016.

memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu untuk memperoleh pendapatan pajak pemerintah harus senantiasa berusaha mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya.²

Salah satu sumber pendapatan ialah dana yang dihimpun dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan dana dari rakyat atas kepemilikan sebuah objek yang dikenal dengan pajak. Menurut Mardiasmo pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam tingkat pengetahuan perpajakan juga sangat penting karena pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Jika tidak mengetahui tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang yang wajib pajak akan membayar pajak dengan ikhlas. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Sanksi pajak juga

² Titis Wahyu Adi, “ pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan KPP Pratama Cilacap pada tahun 2018”, Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

memiliki peran yang sangat penting guna memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pengetahuan akan peraturan perpajakan, wajib pajak juga harus mempunyai sikap keberagamaan (religiusitas), menurut Basri et al, dalam Afrizal Tahar dan Arnai Kartika Rachman³ menegaskan bahwa religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang dan setiap agama pada umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku yang buruk. Sedangkan menurut Panggabean dalam Andhika Utama dan Dudi Wahyudi⁴ mengatakan bahwa religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya. Kemudian menurut Mohdali dalam Andhika Utama dan Dudi Wahyudi⁵ menyebutkan dengan adanya peranan nilai agama,

³ Afrizal Tahar dan Armain Kartika Rachman, “*Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” Jurnal Akuntansi Vol. 15 NO. 1 Januari 2014, hlm 57.

⁴Andhika Utama, dan Dudi Wahyudi. Jurnal “*Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*” Jurnal Lingkar Widyaaiswara (www.juliwi.com) Edisi 3 No. 2, Apr – Jun 2016, p.01 – 13 ISSN: 2355-4118.

⁵Andhika Utama, dan Dudi Wahyudi. Jurnal “*Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*” Jurnal Lingkar Widyaaiswara (www.juliwi.com) Edisi 3 No. 2, Apr – Jun 2016, p.01 – 13 ISSN: 2355-4118.

diharapkan dapat memacu dalam perilaku positif dan mencegah perilaku yang negatif terhadap kepatuhan perpajakan sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan wajib pajak. Jadi, dengan adanya sikap keberagamaan (religiusitas) yang tinggi maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan bagi wajib pajak. Adanya sanksi perpajakan akan memperlancar pelaksanaan dalam perpajakan, apabila wajib pajak melanggar sanksi tersebut, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.⁶ Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perpajakan.⁷ Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan

⁶Mardiasmo, Perpajakan – Edisi Terbaru 2016, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 62

⁷Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono “Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap” Jakarta: salemba empat) 2014 hlm 92.

oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kepatuhan wajib pajak

Tahun	Kepatuhan wajib pajak
2016	80%
2017	60%
2018	88,56%

Sumber : klinik pajak,⁸ suara merdeka,⁹ antara jateng.¹⁰

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus masih mengalami naik turun, pada tahun 2017 dikatakan oleh kepala KPP Pratama Kudus bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih cukup rendah, karena pada tahun tersebut KPP Pratama Kudus targetkan tingkat kepatuhan pajak sebesar 70%.

⁸<http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak++realisasi+penerimaan+pajak+baru+31%25>.

⁹<https://www.suaramerdeka.com/sm cetak/baca/65204/camat-dan-kades-diminta-buka-layanan-pajak>.

¹⁰<https://jateng.antaranews.com/berita/193498/kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus-capai-8856-persen>.

Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Andhika Utama dan Dudi Wahyudi menemukan bahwa bahwa komponen Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati, dan Ketut Budiarta bahwa Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Eken Patmasari, Trimurti², dan Suhendro menemukan bahwa komponen pelayanan pajak berpengaruh signifikan dan negatif, sanksi pajak berpengaruh signifikan dan negatif, sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan dan positif.¹³ Penelitian yang dilakukan oleh Hanifatun Fahmi dalam komponennya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh

¹¹Andhika Utama, dan Dudi Wahyudi. Jurnal “*Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*” Jurnal Lingkar Widyaaiswara (www.juliwi.com) Edisi 3 No. 2, Apr – Jun 2016, p.01 – 13 ISSN: 2355-4118.

¹²Ketut Susilawati dan Evi Dkk, Jurnal “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*” ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 345-357.

¹³ Eken Patmasari, Trimurti dan Suhendro “*Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri*” Seminar Nasional IENACO – 2016 ISSN: 2337 – 4349.

signifikan dan negatif, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran pajak bersama-sama berpengaruh signifikan.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun dalam komponennya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak bersama-sama tidak berpengaruh signifikan dan positif.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Setyowati dalam komponennya menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi dalam komponennya menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan, religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib

¹⁴ Hanifatun Fahmi, *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan”* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016.

¹⁵ Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun, *“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)”* JURNAL AKUNTANSI VOL. 5 NO. 1 JUNI 2017.

¹⁶ Yuni Setiyowati, *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014”* Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2017.

pajak.¹⁷ Berdasarkan masalah diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21”**

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam PPh 21?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam PPh 21?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam PPh 21?

1.3. Tujuan Dan Manfaat

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisa apakah tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib.

¹⁷Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi, “Pengaruh Pengetahuan perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi” Prosiding SENDI_U 2018.

3. Untuk menguji dan menganalisa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pembaca

Dapat menambah pengetahuan mengenai tingkat pemahaman perpajakan, sanksi atau denda perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajiban pajak.

- c. Bagi Penulis (Peneliti)

Sebagai wadah untuk mengaplikasi yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai hasil akhir dari penempuhan stara satu jurusan akuntansi.

1.4. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapaun sistematika penulisan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori yang diperlukan untuk penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis serta kerangka pemikiran.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode atau langkah-langkah yang dilakukan untuk penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, populasi, sampel, sumber data, variabel dan pengukurannya, serta analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Analisis Data Dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian dan hasil yang dilakukan peneliti yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan atau menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasannya.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan pembahasan yang sebelumnya dan saran terhadap penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

2.1.1.1. Teori Gaya Pikul

Teori gaya pikul merupakan teori dimana pengenaan pajaknya sesuai dengan kemampuan wajib pajaknya itu sendiri. Pengukuran pengenaan pajak menurut teori gaya pikul ini dapat menggunakan berdasarkan jumlah kekayaan, penghasilan yang dimiliki beserta jumlah pengeluaran dan jumlah tanggungan keluarga yang sudah menjadi tanggungan.¹

Menurut mardiasmo untuk mengukur gaya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif yaitu dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Misalnya penghasilan perbulan tuan A sebesar 10 juta status menikah dengan 3 anak (K/3) dan tuan B 10 juta status belum menikah, maka secara objektif, pph untuk tuan

¹Siti Resmi, *“Perpajakan Teori dan Kasus”* (Jakarta, Salemba Empat, 2017), hlm 6.

A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besar. Sedangkan secara subjektif, pph untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi A lebih besar daripada B.²

2.1.1.2. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyatnya harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asumsi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2.1.1.3. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayar.

2.1.1.4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai kewajiban.

²Mardiasmo "*perpajakan edisi terbaru 2016*" (Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET, 2016), hlm 5-6.

2.1.1.5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.³

2.1.1.6. Pengertian Pajak

Banyak sekali para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi yang berbeda-beda tentang perpajakan. Namun demikian, dalam berbagai definisi tersebut memiliki tujuan dan inti yang sama yakni agar pengertian perpajakan mudah dipahami, menurut berbagai ahli pengertian pajak sebagai berikut:

Menurut Ardiani, pajak didefinisikan sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan-peraturan, yang tidak akan mendapatkan imbal balik, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

³Mardiasmo “*perpajakan edisi terbaru 2016*” (Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET, 2016), hlm 5-6.

yang berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁴

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitropajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa imbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.

⁴ Liberti Pandiangan “*Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*” (Erlangga, 2014), hlm 3.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni untuk pengeluaran-pengeluaran kebutuhan masyarakat secara luas.⁵

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah suatu iuran dari rakyat, yang berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa adanya imbal balik, dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran kebutuhan masyarakat secara luas.

2.1.1.7. Peranan Pajak

Dalam kitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan hidup sejahtera. Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (cregulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.⁶

⁵ Mardiasmo "*perpajakan edisi terbaru 2016*" (Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET, 2016), hlm 3.

Sedangkan menurut Waluyo (2005:6) disebutkan “sebagaimana telah diketahui ciri-ciriyang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan (budgeteir)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintahan.

2. Fungsi mengatur (reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.⁷

Berdasarkan fungsi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama untuk pembangunan, oleh karena itu pemungutan pajak bisa dipaksakan bagi orang-orang yang wajib dikenakan pajak tentunya semua itu sudah diatur dalam undang-undang perpajakan.

2.1.1.8.Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

⁶ Mardiasmo “*perpajakan edisi terbaru 2016*” (Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET, 2016), hlm 4.

⁷Waluyo “Perpajakan Indonesia” (Jakarta, Salemba Empat, 2005), hlm 6.

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan oleh orang lain.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak objektif yaitu wajib pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri pajak.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.1.9. Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak menurut Waluyo (2005:57) yaitu sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV dan perseroan lainnya.

4. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk yang usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.⁸

⁸ Waluyo “*Perpajakan Indonesia*” (Jakarta, Salemba Empat, 2005), hlm 58.

2.1.1.10 . Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi, tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel pajak

pemungutan pajak dapat dilakukan tiga stelsel, yaitu:

1. Stelsel nyata (riil)

pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.

Sedangkan kekurangan stelsel pajak yaitu pajak baru diketahui pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (fiktif)

pengenaan pajak didasarkan pada suatu yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah ditetapkan besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan. Kelebihan

stelsel ini yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Sedangkan kekurangan stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan. Maka wajib pajak harus menambah kekurangan tersebut. Sebaliknya jika besarnya pajak kenyataan lebih kecil daripada besarnya pajak anggapan maka kelebihan tersebut diminta kembali.

b. Asas pemungutan pajak

asas pemungutan pajak terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari

dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem pemungutan pajak

1. Official assessment system

Merupakan suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Self assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. Witholding system

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.⁹

2.1.1.11. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo tarif yang dikenakan dibedakan menjadi empat bagian, yaitu:

1. Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Misalnya: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang di kenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Misalnya: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

⁹ Siti Resmi, *“Perpajakan Teori dan Kasus”* (Jakarta, Salemba Empat, 2017), hlm 8-11.

Misalnya: pasal 17 Undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1
Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00.	5%
Di atas Rp 50.000.000,00. s.d. Rp 250.000.000,00.	15%
Di atas Rp 250.000.000,00. s.d. Rp 500.000.000,00.	25%
Di atas Rp 500.000.000,00.	30%

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.¹⁰

2.2 Pengetahuan Pajak

Menurut Notoadmojo “pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap

¹⁰ Mardiasmo “*perpajakan edisi terbaru 2016*” (Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET, 2016), hlm 11-12.

obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga”.

Menurut Carolina “pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan”.¹¹

Persoalan mengenai tingkat pengetahuan perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka ketaatan wajib pajak

¹¹ Bayu Caroko, Dkk “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak” Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 1 No. 1 Januari 2015.

mengenai peraturan yang berlaku juga rendah (Spicer and Lundsent, 1976 dalam Mutia, 2014).¹²

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.

2.3.Sanksi Pajak

Menurut Mardiyasmo, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.¹³

Sanksi perpajakan didefinisikan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak. Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi, sebagai berikut:

¹² Devi Marta Ardi, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta”, Journal of Economic and Economic Education Vol.4 No.2 (177 -191)

¹³Mardiasmo “perpajakan edisi terbaru 2016” (Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET, 2016), hlm 62.

1. Sanksi Administrasi

Didefinisikan sebagai pembayaran kerugian pajak kepada negara, khususnya berupa bunga, dan denda.

2. Sanksi Pidana

Didefinisikan sebagai hukuman yang harus dijalani oleh wajib pajak yang melanggar aturan perundang-undangan perpajakan.¹⁴

2.4. Religiusitas

Menurut Nashori religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianut.¹⁵

Menurut McDaniel dan Burnett religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Allah. Allport mengemukakan bahwa agama dianggap peran khas dalam kehidupan individu. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis.

Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku

¹⁴ Mardiasmo “perpajakan edisi terbaru 2016” (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2016), hlm 62-63.

¹⁵ Iredho Fani Reza “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Moralitas Pada Remaja Di Madrasah Aliyah (Ma)” Humanitas, Vol. X No.2 Agustus 2013:46.

kecurangan pajak. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak (Grasmick, Bursik, & Cochran, 1991).¹⁶

Dalam jurnal Ari Kristin, menurut Ghozalimengatakan bahwa religiusitas lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Religiusitas dalam islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas sehari-hari.¹⁷

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa religusitas adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh pihak individual yang berkaitan dengan keagamaan, seberapa jauh pengetahuan tentang keagaaman yang dianut, dan berkomitmen mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam keagamaan yang dianut.

¹⁶Yesi Mutia Basri “*Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak*” Akuntabilitas, Vol. VIII 1, April 2015, hlm 67-77.

¹⁷ Ari Kristin P, “*Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor Dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia)*”, Volume II / Edisi 2/ Nopember 2012, Jurnal Economica, hlm 135.

2.5. Kepatuhan Pajak

Muliari dan Setiawan mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Muliari dan Setiawan menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

1. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
2. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
3. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan

pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

4. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi Fiskal.¹⁸

Dalam jurnal Monita Dkk, menurut Rahayu ada dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua kepatuhan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan.¹⁹

2.6. Pajak Dalam Perspektif Islam

Untuk menegaskan bahwa sejak awal sesungguhnya *zakat* adalah ajaran moral atau etika transendental untuk pajak

¹⁸Oktaviane Lidya Winerungan “*Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*” Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 960-970.

¹⁹ Monita Pantreysih Dauhan Dkk, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung)”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04 Tahun 2015.

serta pembelanjaannya, dan pada gilirannya juga untuk negara. Pada kenyataannya bahwa pajak adalah basis material dan darah kehidupan negara dan kekuasaannya. Tidak ada negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa pajak rakyat.

Sepanjang sejarah ada tiga konsep makna yang pernah diberikan kepada pranata pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dengan konsep upeti atau “persembahan kepada raja” yaitu negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja, atau kekuasaan raja.
2. Pajak dengan konsep “kontra-prestasi” atau jizyah yaitu antara rakyat pembayar pajak, terutama yang kut, dan pihak penguasa. Negara dengan pajak jizyah adalah negara yang mengabdikan kepada kepentingan penguasa dan kelompok yang kaya.
3. Pajak dengan konsep “etik atau ruh zakat” yaitu pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah, siapapun mereka, apa pun agama, etnis, ras, maupun golongannya.²⁰

Dalam pajak upeti bahwa kedudukan rakyat kepada raja dengan bukti material berupa pajak dibangun atas dua alasan. Pertama alasan bahwa raja adalah titisan Tuhan atau hadir atas

²⁰Masdar Farid Mas’udi “ *Pajak Itu Zakat*” (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2005), hlm 70-71.

penunjukan langsung oleh Allah dan bertindak untuk kepentingan-kepentingan Allah. Kedua alasan bahwa rakyat hidup dari hasil bumi dan kekayaan yang dimiliki oleh raja atau yang ada dalam kekuasaannya. Pajak jizyah merupakan pajak yang lebih maju dari pajak upeti, dikarenakan rakyat mulai membuat perhitungan dengan negara atau penguasa yang menerimanya, pajak boleh dipungut tetapi negara atau pemerintah harus membayar balik kepada rakyat berupa perlindungan dan pelayanan umum yang diperlukan rakyat. Dan pada akhirnya pajak tersebut tadi sebagai sedekah untuk kemaslahatan rakyat (zakat), pajak yang dihimpun oleh pemerintah harus digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama yang paling tidak berdaya. Artinya dalam konsep Islam, penggunaan pajak bukan saja secara sungguh-sungguh harus ditujukan untuk kepentingan rakyat sebagaimana diperintahkan oleh Allah, melainkan juga harus dipertanggungjawabkan kepada keduanya sekaligus. Secara sosial di dunia dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya, dan secara ruhaniah di akhirat dipertanggungjawabkan kepada Allah. Apa dan siapakah yang dimaksud dengan rakyat untuk siapa pajak diperuntukkan dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنَ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya pajak-pajak itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Taubah: 60).

Dalam konteks administrasi negara modern, delapan patokan inilah yang seharusnya menjadi patokan dalam penyusunan anggaran belanja negara, baik di pusat (APBN) maupun di pusat (APBD).²¹

Alokasi anggaran negara seperti disebut dalam ayat diatas dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor besar, yaitu:

1. Sektor pemberdayaan masyarakat lemah.
2. Sektor biaya rutin (amilin).
3. Sektor sabilillah atau pelayanan publik.²²

²¹Masdar Farid Mas'udi " *Pajak Itu Zakat* " (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2005), Hlm 72-92.

²²Masdar Farid Mas'udi " *Pajak Itu Zakat* " (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2005), Hlm 112.

Aturan-aturan konstitutif untuk implementasi etika zakat (kemaslahatan rakyat, terutama yang lemah) dalam sistem perpajakan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pajak-zakat dikenakan dan dipungut, yang dalam administrasi pemerintahan modern di atur dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Ketentuan menyangkut alokasi pembelanjaan uang pajak, untuk kepentingan apa dan siapa saja uang itu dibelanjakan, yang dalam administrasi pemerintahan modern lazim diatur dalam Undang-Undang Belanja Negara.
3. Ketentuan tentang lembaga pemerintah sebagai amil pajak, perihal hak dan tanggung jawabnya.

Dalam sejarah administrasi pemerintahan, Rasulullah Saw. selaku kepala negara atau pemerintahan mencanangkan sistem perpajakan yang di dalamnya tarif pajak (miqdar zakah), objek pajak (mal zakawi), dan batas minimal kekayaan atau pendapatan terkena pajak (nishab), ditetapkan dengan jelas, tegas dan berlaku untuk semua warga yang tergolong sebagai wajib pajak (muzakki). Sistem perpajakan Rasulullah Saw. didasarkan atas ketentuan-ketentuan (syara'i) yang strategis dan praktis sebagai berikut:

1. Fungsi pajak sebagai instrumen vital bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa “pajak-zakat merupakan
-

kewajiban sosial yang harus dibayar oleh mereka yang telah memiliki tingkat kekayaan atau penghasilan tertentu.

2. Berkaitan dengan objek pajak, Rasulullah Saw. menetapkan bahwa pajak dikenakan atas jiwa dan harta. Pajak atas jiwa disebut zakat fitral, pajak atas kekayaan/harta disebut zakat mal.
3. Sistem perpajakan harus ditentukan tarif tertentu yang jelas dan umum.
4. Waktu pembayaran pajak, sebagian pajak dibayar secara periodic, sebagian yang lain dibayar bergantung pada kapan penghasilan yang terkena pajak itu diperoleh.
5. Tujuan keadilan dan kesejahteraan bersama, penunaian pajak-zakat harus melewati pihak ketiga atau amil yang secara structural memiliki kewenangan memadai untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.²³

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian menggunakan alat analisis yang sama namun menunjukkan hasil yang beragam penelitian relevan yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain:

²³Masdar Farid Mas'udi “ *Pajak Itu Zakat*” (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2005), Hlm 101-108

Pertama, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Andhika Utama dan Dudi Wahyudi yang berjudul “Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta” menemukan bahwa bahwa komponen Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak .²⁴

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati, dan Ketut Budiarta yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” hasilnya menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.²⁵

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Eken Patmasaril, Trimurti2, dan Suhendro yang berjudul “Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap

²⁴Andhika Utama, dan Dudi Wahyudi. Jurnal “*Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*” Jurnal Lingkar Widyaishwara (www.juliwi.com) Edisi 3 No. 2, Apr – Jun 2016, p.01 – 13 ISSN: 2355-4118.

²⁵Ketut Susilawati dan Evi Dkk, Jurnal “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*” ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 345-357.

Kepatuhan Membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri.” menemukan bahwa komponen pelayanan pajak berpengaruh signifikan dan negatif, sanksi pajak berpengaruh signifikan dan negatif, sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan dan positif.²⁶

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Hanifatun Fahmi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran oleh Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan “ hasil penelitian nmenyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran pajak bersama-sama berpengaruh signifikan.²⁷

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Rumiya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)” hasil penelitiannya

²⁶ Eken Patmasari, Trimurti dan Suhendro “*Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri*” Seminar Nasional IENACO – 2016 ISSN: 2337 – 4349.

²⁷ Hanifatun Fahmi, “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan*” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016.

menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak bersama-sama tidak berpengaruh signifikan dan positif.²⁸

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Setyowati yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014” hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif.²⁹

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi “ hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan, religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib

²⁸ Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)” JURNAL AKUNTANSI VOL. 5 NO. 1 JUNI 2017.

²⁹ Yuni Setiyowati, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014” Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2017.

pajak, dan religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.³⁰

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andhika Utama dan Dudi Wahyudi	Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta	Religiusitas dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Variabel religiusitas berpengaruh signifikan
2	Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budhiarta	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak,	Kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak,	Kuantitatif	Kesadaran pajak, pengetahuan, pajak, sanksi

³⁰Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi, “Pengaruh Pengetahuan perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi” Prosiding SENDI_U 2018.

		Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	akuntabilitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak		pajak dan akuntabilitas pelayanan bersama-sama berpengaruh signifikan
3	Eken Patmasaril, Trimurti2, dan Suhendro	Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri.	Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak	kuantitatif	Pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif, sanksi pajak berpengaruh signifikan dan negatif, sistem perpajakan tidak

					berpengaru hsignifikan dan positif, kepatuhan wajib pajak berpengaru h signifikan dan positif.
4	Hanifatun Fahmi	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran oleh Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan	Pengetahuan Perpajakan, kualitas pelayanan pemerintah daerah, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	Kuantitatif	Pengetahu an perpajakan berpengaru h signifikan dan negatif, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran wajib pajak bersama- sama

		Bangunan			berpengaruh signifikan dan positif
5	Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaun	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, sistem samsat drive Thru, dan kepatuhan wajib pajak.	kuantitatif	Pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan dan positif, kepatuhan wajib pajak dan sistem samsat drive Thru secara bersamaan berpengaruh signifikan

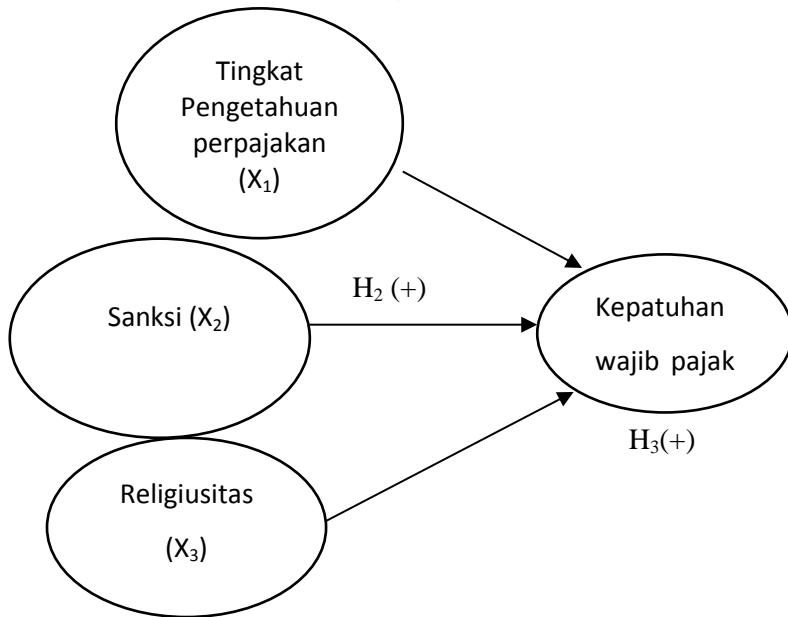
					dan positif
6	Yuni Setyowati	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014	Pengetahuan perpajakan, sanksipajak, kesadaran pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan	kuantitatif	Pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif
7	Nanik	Pengaruh	Pengetahuan	Kuantitatif	Pengetahu

	Ermawati dan Zaenal Afifi	Pengetahuan perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi	perpajakan, sanksi pajak, religiusitas, dan kepatuhan wajib pajak		an pajak berpengaru h signifikan, sanksi pajak dan religiusitas tidak berpengaru h signifikan
--	---------------------------------	--	--	--	---

2.8. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Tingkat pengetahuan perpajakan (X₁) dari penelitian Haryanto,³¹ sanksi (X₂) dari penelitian Dina,³² dan religiusitas (X₃) dari penelitian Nanik.³³

³¹ Haryanto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wpop Yang Memiliki Usaha Di Kota Kudus)", DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, hlm 3.

³² Dina, "Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Merauke", JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL, VOLUME VI NO. 1, APRIL 2015.

2.9. Hipotesis Penelitian

Menurut James E. Greighton, hipotesis adalah sebuah dugaan tentatif atau sementara yang memprediksi situasi yang akan diamati.³⁴

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

2.9.1. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pengetahuan mengenai perpajakan menjadi hal yang penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jika pengetahuan wajib pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan wajib pajak juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya. Wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami undang-undang dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan tingkat pengetahuan wajib pajak rendah.

³³ Nanik, “*Pengaruh Pengetahuan perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*” Prosiding SENDI_U 2018.

³⁴ Nanang Martono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*”, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012), hlm 63.

H₁: Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9.2. Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiyasmo, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak.

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9.3. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas menunjukan pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Semua agama pada umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku baik atau menghambat perilaku yang buruk. Religiusitas mempunyai pengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H₃: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut E.G. Carmines dan R.A. Zeller, penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik.¹

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), data primer dapat berupa opini subyek (orang), secara individual atau kelompok, dan hasil observasi.²

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Ma'ruf Abdullah adalah kumpulan unit yang akan diteliti ciri-ciri (karakteristik) nya, dan apabila

¹Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, “*Metode Penelitian*”,(Yogyakarta, C.V Andi Offset), 2010, hlm 26.

²Muhammad Fauzi, “Metode penelitian kuantitatif”, walisongo press, 2009, hlm 165

populasinya terlalu luas, maka peneliti harus mengambil sampel (bagian dari populasi) itu untuk diteliti.³Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

Sampel menurut Manang Martono merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti.⁴Sampel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.⁵ Pengambilan sampel yaitu pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Kudus, pada tahun 2018 populasi wajib pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus sebanyak 72.201.⁶Untuk menentukan jumlah sampel dapat menggunakan rumus slovin sebagai berikut⁷:

³Ma'ruf Abdullah, "*Metodelogi penelitian kuintitatif*", (Yogyakarta, Aswaja Presindo), 2015, hlm 226.

⁴Manang Martono, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada), 2012, hlm 74.

⁵Nanang Martono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*", (Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada, 2012), hlm 79.

⁶<https://jateng.antaranews.com/berita/193498/kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus-capai-8856-persen>.

⁷Bambang prasetyo, "*metode penelitian kuantitatif*", Jakarta, 2012, hlm 137.

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{(1 + N e^2)}$$

Dimana : n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{(1 + N e^2)} \\ n &= \frac{72.201}{(1 + 72.201 \times 0,05^2)} \\ n &= \frac{72.201}{180,505} \end{aligned}$$

n= 399 maka dibulatkan menjadi 400 sampel.

Untuk mempersingkat waktu dalam pengambilan sampel ini peneliti menggunakan rumus menurut Ferdinand yaitu sebagai berikut:⁸

25 x variabel independen

25 x 3 = 75 sampel

Maka sampel yang digunakan untuk penelitian yaitu sebesar 75 sampel.

⁸Freida Triastuti RJ, Augusty Tae Ferdinand “*Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk Dan Promosi Penjualan Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen (Studi Pada Buket Koffee+Jazz Semarang)*” *DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT* Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-13.

Dari perhitungan diatas maka diperoleh besaran sampel sebesar 75 responden. Selanjutnya dalam penelitian ini 75 sampel tersebut akan disebar dan di peroleh data dalam bentuk kuesioner pada wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁹

Pengumpulan data yaitu melalui penyebaran kuesioner, yaitu dengan melakukan observasi di Kantor Pelayan Pajak Pratama Kudus untuk memberikan daftar kuesioner kepada wajib pajak yang datang ke kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Padadasarnya penentuan variabel penelitian merupakan opsioanal konstrak supaya dapat diukur. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y) diukur menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian Anggun, variabel independen tingkat pengetahuan perpajakan (X1) diukur menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian fikriningrum, sanksi perpajakan (X2) diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian Arum, religiusitas (X3) diukur

⁹Moh. Nazir “metode penelitian”Ghalia Indonesia”, Bogor, 2017, hlm 153.

dengan indikator yang mengacu pada penelitian Basri. Dalam penelitian ini operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua perpajakandan melaksanakannya	1.formal dan materil
Pengetahuan perpajakan (X ₁)	Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam bidang perpajakan	1. Pengertian pajak 2. Fungsi pajak 3. Jenis pajak 4. Tarif pajak
Sanksi (X ₂)	sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak.	1.Sanksi pidana dan sanksi administrasi
Religiusitas (X ₃)	Penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai	1.Keyakinan terhadap agama 2.Praktik agama 3.Pengetahuan agama

	keagamaanyang diyakini.	4. Pengalaman agama
--	----------------------------	------------------------

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.¹⁰

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing dalam variabel independen (bebas). Metode analisis data akan menggunakan bantuan program dari aplikasi SPSS.

3.6.1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

¹⁰Moh. Nazir *"metode penelitian"*Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, hlm 304.

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹¹

3.7. Uji Reliabilitas Dan Validitas

3.7.1. Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghozali, uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.¹²

3.7.2. Uji Validitas

Menurut Imam Ghozali, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.¹³

¹¹Sugiyono, *“metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D”* Alvabeta cv, Banung, 2016, hlm 147.

¹²Imam Ghozali, *“Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21”*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm47.

¹³Imam Ghozali, *“Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21”*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm 52.

3.8. Uji Asumsiklasik

Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasititas, uji autokorelasi, dan uji linearitas.

3.8.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.¹⁴

3.8.2. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali, uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Tidak terjadinya

¹⁴ Imam Ghozali, *“Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21”*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm 160.

multikolonieritas apabila nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 .¹⁵

3.8.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.¹⁶

3.9. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

¹⁵ Imam Ghozali, “*Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21*”, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm 105-106.

¹⁶ Imam Ghozali, “*Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21*”, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm 139.

3.9.1. Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen.¹⁷ Persamaan regresi yang di rumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = konstanta

β = koefisien regresi

X_1 = Tingkat Pengetahuan Perpajakan

X_2 = Sanksi Pajak

X_3 = Religiusitas

e = Residual

3.9.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali, koefisiensi determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai mendekati satu berarti variabel-variabel

¹⁷Haryadi sarjono dan winda julianita, “SPSS vs LISREL”, (jakarta, salemba empat, 2011), hlm 91.

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.¹⁸

3.9.3. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali, uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap dependen atau terikat. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.¹⁹

3.9.4. Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

¹⁸Imam Ghozali, *“Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21”*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm 97.

¹⁹Imam Ghozali, *“Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21”*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm 98.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Kantor pelayanan pajak pratama kudas menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus di wilayah Kabupaten Kudus yang terdiri dari 9 kecamatan.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus terdiri dari Kepala Kantor, Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Pengolaan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Pemerintahan dan Kepatuhan Internal, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Penilai PBB.

Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dan pelayanan kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus adalah gedung kantor 9 terdiri dari 1 gedung kantor, gedung TPT, gedung eks. KP PBB kudas, gedung eks. KP4 Mejobo), kendaraan dinas, jaringan sistem informasi data, sarana peribadatan dan olahraga, wilayah kerja kantor Pelayanan

Pajak Pratama Kudus mencakup Kabupaten Kudus yang terdiri 9 Kecamatan.

1.1.2. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Indonesia”

1.1.3. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Menghimpun penerimaan pajak dengan menyelenggarakan pelayanan dan edukasi perpajakan demi mewujudkan masyarakat Kudus yang sadar dan tertib pajak.

1.1.4. Tujuan

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut dan dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dimiliki, maka kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus telah menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Merealisasikan rencana penerimaan pajak yang dibebankan kepada kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.
- b. Peningkatan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.
- c. Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.
- d. Peningkatan profesionalisme dan integritas SDM.

1.1.5. Wilayah Kerja

Wilayah kerja kantor Pelayana Pajak Pratam Kudus terbagi dalam 9 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Kota
2. Kecamatan Bae
3. Kecamatan Kaliwungu
4. Kecamatan Gebog
5. Kecamatan Jati
6. Kecamatan Dawe
7. Kecamatan Undaan
8. Kecamatan Mejobo
9. Kecamatan Jekulo

1.1.6. Tugas, dan Fungsi Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Sebagai bagian dari organisasi Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 mempunyai tugas: melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan registrasi perpajakan.
6. Pelaksanaan ekstensifikasi dan pemeriksaan pajak.
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
10. Pelaksanaan intensifikasi.
11. Pembetulan ketetapan pajak.
12. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
13. Pelaksanaan administrasi kantor.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak pasal 60, disebutkan bahwa Knator Pelayanan Pajak Pratama terdiri dari:

1. Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas mengarahkan dan mengoordinir seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

2. Sub bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas pngumpulan, pencarian data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer serta penyipan laporan kerja.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap wajib pajak yaitu penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan dan surat lainnya, administrasi dokumen perpajakan, penetapan dan penerbitan

produk hukum perpajakan, penyuluhan perpajakan, dan registrasi wajib pajak.

5. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan kegiatan penatausahaan piutang pajak, penagihan aktif, pembuatan usulan penghapusan piutang pajak, penyitaan dan pelelangan serta penyimpanan dokumen penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengawasan pelaksanaan, dan administrasi pemeriksaan perpajakan, melakukan pemantauan manajemen resiko dan pengendalian internal, pengawasan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjutnya.

7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan penggalan potensi perpajakan dengan cara melakukan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, dan

rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi pajak.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

1.1.7. Mandat yang Diberikan Kepada Instansi

Direktorat Jendral Pajak adalah sebuah Direktorat Jendral yang dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jendral Pajak melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Kementrian Keuangan di bidang perpajakan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral Pajak.

1.1.8. Sumber Penerimaan Pajak

Beberapa sumber daya yang menunjang penerimaan pajak antara lain potensi penerimaan pajak hasil tembakau (perusahaan rokok), percetakan, perdagangan, dan jasa yang mendominasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Selain itu juga ditunjang Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas-tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dengan berbagai macam latar belakang pendidikan.

1.1.9. Gambaran Umum Responden

Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

1.1.9.1. Jenis Kelamin Responden

Adapun data dan prosentase mengenai perbandingan jenis kelamin responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentas
1	Laki-laki	40	53,3%
2	Perempuan	35	46,7%
	Total	75	100%

Sumber : Data Primer diolah, (2019)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 53,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus berjenis kelamin laki-laki.

1.1.9.2. Umur Responden

Adapun data mengenai umur responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	20-30 Tahun	19	25,3%
2	31-40 Tahun	35	46,7%
3	41-50 Tahun	21	28,0%
	Total	75	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, (2019)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berusia 31-40 tahun. Hal ini dapat diketahui dari prosentasenya sebesar 46,7%.

1.1.9.3. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	9	12.0%
2	D3	18	24.0%
3	S1	48	64.0%
	Jumlah	75	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa responden sebagian besar berpendidikan S1. Hal ini dapat diketahui dari prosentaseya sebesar 64.0%.

1.2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data penelitian agar memperjelas keadaan data yang bersangkutan. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Tabel 4.4 berikut ini menyajikan statistik deskriptif atas variabel-variabel yang terlihat dalam penelitian ini.

Tabel 4.4.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
kepatuhan wajib pajak	75	8.0	20.0	16.213	2.0421
Tingkat Pengetahuan Perpajakan	75	8.0	20.0	16.213	2.3267
SANKSI	75	8.0	20.0	15.760	2.2472
Religiusitas	75	8.0	20.0	16.387	2.2892
Valid N (listwise)	75				

Sumber : Data Primer yang diolah, (2019)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa jumlah data penelitian (N) adalah sebesar 75. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum 8 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar 16.213 dengan nilai standar deviasi sebesar 2.0421.

Pada variabel tingkat pengetahuan perpajakan dilakukan pengamatan terhadap 75 responden, dimana dari 75 responden mempunyai nilai minimum 8 dan nilai maksimum 20. Sedangkan nilai rata-rata 16.213 dengan nilai standar deviasi sebesar 2.3267.

Pada variabel sanksi dilakukan pengamatan terhadap 75 responden, dimana dari 75 responden mempunyai nilai

minimum sebesar 8 dan maksimum sebesar 20. Sedangkan nilai rata-rata 15.760 dengan nilai standar deviasi sebesar 2.2472.

Pada variabel religiusitas dilakukan pengamatan terhadap 75 responden, dimana dari 75 responden mempunyai nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 20. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 16.387 dan nilai standar deviasi sebesar 2.2892.

1.3. Uji Validitas Dan Reliabilitas

1.3.1. Hasil Uji Validitas

Kriteria daftar pernyataan untuk bisa dikatakan valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} peneliti menggunakan alat bantu SPSS 22 sedangkan mencari r_{tabel} peneliti mencari dari tabel (terlampir) dengan mengetahui terlebih dahulu derajat kebebasannya.

Dengan kebebasan (*Degree of freedom*) dalam penelitian ini adalah $df = n - 2$. Dengan ketentuan n (jumlah responden) adalah 75 responden, jadi besarnya $df = 75 - 2 = 73$ dengan alpha 0,05 (5%). Maka di dapat r_{tabel} 0,191. Adapaun uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item –Total Correlation	R_{tabel}	Keterangan
Tingkat Pengetahuan Perpajakan	X1. 1	0,511	0,191	Valid
	X1. 2	0,695	0,191	Valid
	X1. 3	0,742	0,191	Valid
	X1. 4	0,581	0,191	Valid
Sanksi	X2. 1	0,689	0,191	Valid
	X2. 2	0,734	0,191	Valid
	X2. 3	0,720	0,191	Valid
	X2. 4	0,602	0,191	Valid
Religiusitas	X3. 1	0,542	0,191	Valid
	X3. 2	0,640	0,191	Valid
	X3. 3	0,681	0,191	Valid
	X3. 4	0,588	0,191	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,403	0,191	Valid
	Y2	0,559	0,191	Valid
	Y3	0,555	0,191	Valid

	Y4	0,524	0,191	Valid
--	----	-------	-------	-------

Sumber : Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan di atas dikatakan valid. Karena setiap item memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi dari r_{tabel} yaitu 0,191.

1.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban seorang responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan dalam setiap variabel. Uji reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan uji statistik *Cronbach Alpha Coefficient* (α). Hasil perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha Coefficient (α)	Keterangan
X1	0,808	Reliabel
X2	0,847	Reliabel
X3	0,800	Reliabel
Y	0,717	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner reliabel karena nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) lebih dari 0,60.

Variabel X1 memiliki nilai Cronbach Alpha Coefficient sebesar $0,808 > 0,60$. Variabel X2 memiliki nilai Cronbach Alpha Coefficient sebesar $0,847 > 0,60$.

Variabel X3 memiliki nilai Cronbach Alpha Coefficient sebesar $0,800 > 0,60$.

Variabel Y memiliki nilai Cronbach Alpha Coefficient sebesar $0,717 > 0,60$.

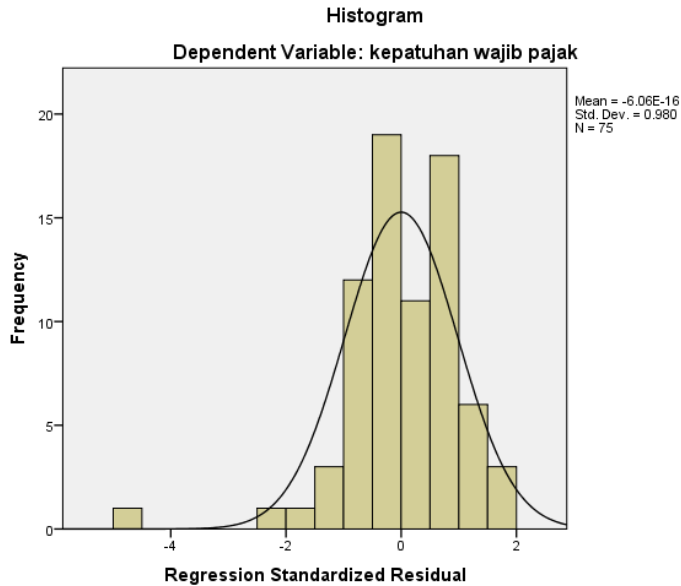
1.4. Uji Asumsi Klasik

1.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan pendekatan histogram, pendekatan plot dan pendekatan Kolmogorov-Smirnov.

4.4.1.1 Uji Normalitas Pendekatan Histogram

Pada pendekatan histogram, dikatakan variabel berdistribusi normal jika berbentuk lonceng yang tidak menceng ke kiri atau ke kanan. Hasil pengujian dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.1**Normalitas Pendekatan Histogram**

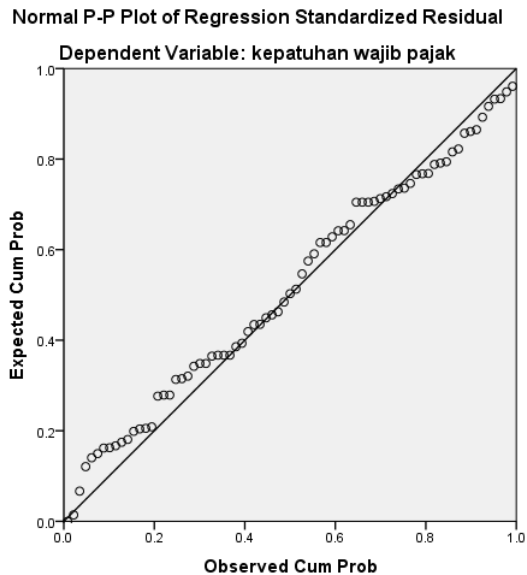
Sumber : data primer yang diolah (2019)

Pada grafik histogram diatas terlihat bahwa variabel berdistribusi normal. Hal ini dapat ditunjukkan oleh distribusi data tersebut tidak miring ke kiri ataupun kekanan dan membentuk lonceng. Sehingga penyebaran datanya telah berdistribusi normal.

4.4.1.2 Uji Normalitas Pendekatan Plot

Grafik 4.2

Normalitas Pendekatan Plot



Sumber : Data Primer yang Diolah, (2019)

Berdasarkan grafik normal plot diatas dapat diketahui bahwa data residual dalam penelitian ini normal. Hal tersebut terjadi karena apabila residual dari distribusi yang normal, maka nilai sebaran terletak di sekitar garis lurus. Pada gambar grafik di atas juga terlihat bahwa sebaran residual yang dilambangkan dengan titik atau lingkaran kecil tersebar disekeliling garis diagonal dan mengikuti arahnya. Sehingga normalitas dalam penelitian ini terpenuhi.

4.4.1.3. Uji Normalitas Pendekatan Kolmogorov-Smirnov

Uji normalitas dengan pendekatan statistik Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.69516395
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.054
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Su

mber : Data Primer yang diolah(2019)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar $0,200 > 0,05$ atau lebih

besar dari 0,05. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa data residual telah terdistribusi normal, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikansi harus lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hasil uji ini telah konsisten dengan uji sebelumnya.

4.4.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya variabel bebas. Model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Pada penelitian ini untuk menunjukkan ada atau tidaknya multikolinieritas maka dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF. Apabila nilai VIF < 10 dan *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terjadi adanya multikolinieritas antar variabel independennya. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a				
Model			Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	Tingkat Pengetahuan		.988	1.013
	Perpajakan			
	SANKSI		.999	1.001
	Religiusitas		.987	1.013

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber :Data Primer yang diolah, (2019)

Berdasarkan hasil uji multikolineritas dapat diketahui bahwa semuavariabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah, variabel tingkat pengetahuan perpajakan sebesar 0,988, variabel sanksi sebesar 0,999, dan variabel religiusitas sebesar 0,987. Sehingga nilai tersebut dapat terpenuhi karena syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus lebih dari 0,1.

Selain itu nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah sebesar 1.013 untuk variabel tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi sebesar 1.001, dan untuk religiusitas sebesar 1,013. Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji multikolonieritas ini bahwa nilai dari VIF harus kurang dari 10. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

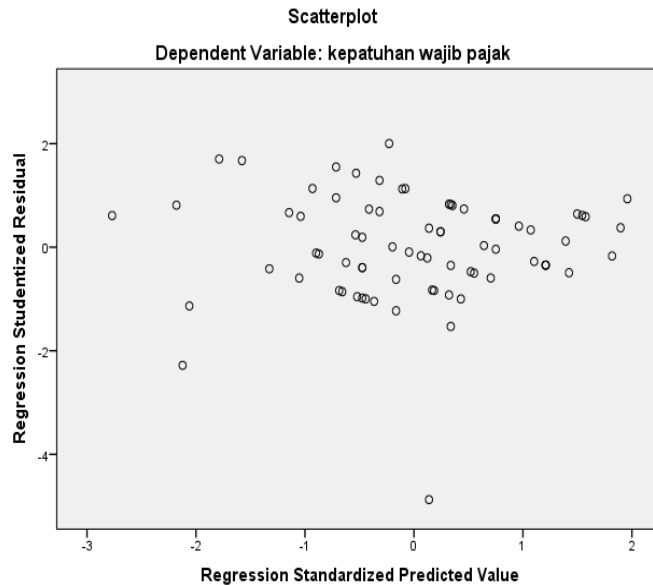
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

4.4.3.1 Uji Heteroskedastisitas Dengan Menggunakan *Scatterplot*

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini:

Grafik 4.3

Grafik Scatterplot



Sumber : Data Primer yang diolah, (2019)

Gambar di atas merupakan gambar yang diperoleh dari hasil uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dari hasil grafik di atas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Oleh karena itu, dengan hasil yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi dalam penelitian ini. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi

kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel independennya adalah tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi dan religiusitas.

4.4.3.2. Uji Heteroskedastisitaas Dengan Menggunakan Uji Glejser

Uji glejser dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji Glejser

Coefficients ^a						
		Unstandardized		Standardize		
		Coefficients		d		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.465	1.529		2.920	.005
	Tingkat Pengetahuan Perpajakan	-.041	.056	-.084	-.727	.470
	SANKSI	-.111	.058	-.219	-1.915	.060
	Religiusitas	-.049	.057	-.099	-.862	.392

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber : Data Primer yang diolah, (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil tampilan output SPSS denga jelas menunjukan bahwa tidak ada

satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari angka signifikansinya diatas 0,05 atau lebih dari 0,05. Variabel tingkat pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,470 > 0,05$. Variabel sanksi memiliki nilai signifikasni sebesar $0,60 > 0,05$. Variabel religiusitas memiliki nilai signifikansi sebesar $0,392 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4.5. Analisi regresi berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) yang terdiri dari Tingkat Pengetahuan perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Koefisien Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.072	2.369		1.297	.199
Tingkat Pengetahuan Perpajakan	.209	.087	.238	2.401	.019
SANKSI	.365	.090	.402	4.075	.000
Religiusitas	.244	.088	.274	2.763	.007

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah, (2019)

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel 4.9, dapat dirumuskan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 7.817 + 0,416 + 0,042 + 0,77 + e$$

Keterangan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = konstanta

β = koefisien regresi

X_1 = Tingkat Pengetahuan Perpajakan

X_2 = Sanksi

X_3 = Religiusitas

e = Standar error

Berdasarkan persamaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Koefisien (α) = nilai konstanta dari persamaan regresi linier berganda ini sebesar 3.072 menyatakan bahwa jika variabel tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi dan religiusitas sama dengan 0, maka kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus akan sebesar 3.072.
- b. Koefisien X_1 (Tingkat Pengetahuan Perpajakan)
 Nilai dari koefisien regresi X_1 yaitu sebesar 0,209 ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain, apabila tingkat pengetahuan perpajakan naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,209 dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Koefisien X_2 (Sanksi)
 Nilai dari koefisien regresi X_2 yaitu sebesar 0,365 ini menunjukkan bahwa variabel sanksi berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain, apabila sanksi naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,365 dengan asumsi variabel lain tetap.

d. Koefisien X_3 (Religiusitas)

Nilai dari koefisiensi regresi X_3 yaitu sebesar 0,244 ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain, apabila religiusitas naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,44 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.6. Pengujian Hipotesis

Pembuktian apakah variabel tingkat pengetahuan, sanksi, dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara simultan maupun parsial. Pembuktian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas yang meliputi tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

4.6.1. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variabel

dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat padatablel 4.11 berikut:

Tabel 4.11
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.558 ^a	.311	.282	1.7306

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, SANKSI, Tingkat Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah, (2019)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa koefisien determinasi yang telah disesuaikan R Square adalah sebesar 31,1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas. Sedangkan sisanya ($100\% - 31,1\% = 68,9\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

4.6.2. Uji signifikansi simultan (uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas yang terdiri dari tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu

kepatuhan wajib pajak. Uji F dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut

Tabel 4.12
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95.942	3	31.981	10.678	.000 ^b
	Residual	212.645	71	2.995		
	Total	308.587	74			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Religiusitas, SANKSI, Tingkat Pengetahuan Perpajakan

Sumber : Data Primer yang diolah, (2019)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji yang diperoleh nilai F-hitung sebesar 10.67 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dalam hal ini nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa efisiensi tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3. Uji Signifikasi Parsial (uji t)

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak digunakan statistik t (Uji t). Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0

ditolak dan H_a diterima. Jika tingkat signifikansi dibawah 0,5 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Diketahui t_{tabel} untuk $df = n - 2$ yaitu $df = 75 - 2 = 73$ dan tingkat signifikansi (α) = 5% maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,993. Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.072	2.369		1.297	.199
Tingkat Pengetahuan Perpajakan	.209	.087	.238	2.401	.019
SANKSI	.365	.090	.402	4.075	.000
Religiusitas	.244	.088	.274	2.763	.007

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah, (2019)

1. Tingkat pengetahuan perpajakan (X_1)

Variabel tingkat pengetahuan perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,401 sedangkan nilai t_{tabel} 1,993. Dengan

demikian nilai $t_{hitung} (2,401) > t_{tabel} (1,993)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$. Dan koefisien sebesar 0,209. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang berarti berpengaruh positif dan signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

2. Sanksi (X_2)

Variabel sanksi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,075 sedangkan nilai t_{tabel} 1,993. Dengan demikian nilai $t_{hitung} (4,075) > t_{tabel} (1,993)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dan koefisien sebesar 0,365. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang berarti berpengaruh positif dan signifikan, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima.

3. Religiusitas (X_3)

Variabel religiusitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,763 sedangkan t_{tabel} 1,993. Dengan demikian nilai $t_{hitung} (2,763) > t_{tabel} (1,993)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$. Dan koefisien sebesar 0,244. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas yang berarti berpengaruh positif dan signifikan, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima.

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan (X_1), sanksi X_2), dan religiusitas (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak, maka peneliti telah melaksanakan penelitian tersebut melalui 75 responden.

Penelitian tersebut dilaksanakan peneliti untuk menjawab permasalahan dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus)”. Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti menggunakan bantuan SPSS, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

4.7.1. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap wajib pajak terhadap tingkat pengetahuan perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,401 sedangkan nilai t_{tabel} 1,993. Dengan demikian nilai t_{hitung} (2,401) $> t_{tabel}$ (1,993), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$ dan memiliki koefisien yang berpengaruh positif sebesar 0,209. Artinya variabel tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budhiarta mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimana menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif. Sebaliknya

penelitian ini tidak sesuai dengan Hanifatun Fahmi mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dimana menyebutkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif.

Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, maka akan semakin kemungkinan wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakannya maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

4.7.2. Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,075 sedangkan nilai t_{tabel} 1,993. Dengan demikian nilai t_{hitung} ($4,075$) $<$ t_{tabel} ($1,993$), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan memiliki koefisien yang berpengaruh positif sebesar 0,365. Artinya sanksi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan Yuni Setyowati mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa kalidengen, kecamatan temon, kabupaten kulon progo tahun 2014, dimana menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan. Sebaliknya penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaun mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus wp pkb roda empat di samsat drive thru bantul), dimana menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif.

Sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap sanksi maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari koefisien dan signifikansi nya dapat diketahui bahwa wajib pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus merasa takut jika akan dijatuhi sanksi jika melanggar peraturan dalam pelaksanaan perpajakan.

4.7.3. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap wajib pajak terhadap saksi pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2.763 sedangkan t_{tabel} 1,993. Dengan demikian nilai t_{hitung} (2.763) < t_{tabel} ($1,993$), maka H_0 ditolak dan H_3 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ dan memiliki koefisien yang berpengaruh positif sebesar 0,244. Artinya religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Andhika Utama dan Dudi Wahyudi mengenai pengaruh religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan. Sebaliknya ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi, dimana menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya peranan nilai agama, diharapkan memicu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan melalui keyakinan agama yang kuat sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel tingkat pengetahuan perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,401 sedangkan nilai t_{tabel} 1,993. Dengan demikian nilai t_{hitung} (2,401) > t_{tabel} (1,993) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$. Dan koefisien sebesar 0,209. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak.
2. Variabel sanksi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,075 sedangkan nilai t_{tabel} 1,993. Dengan demikian nilai t_{hitung} (4,075) > t_{tabel} (1,993) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dan koefisien sebesar 0,365. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi

yang berarti berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Variabel religiusitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,763 sedangkan t_{tabel} 1,993. Dengan demikian nilai t_{hitung} ($2,763$) $>$ t_{tabel} ($1,993$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,007 > 0,05$. Dan koefisien sebesar 0,44. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas yang berarti berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Karena terbatas waktu, sampel penelitian yang diambil pada penelitian ini sebanyak 75 responden yang diambil dari satu kabupaten, sehingga kurang mampu mewakili populasi yang jumlahnya ribuan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel pengukur sehingga kesimpulan penelitian menjadi terbatas.

5.3 Saran

Berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebaiknya terus melakukan sosialisasi terkait perpajakan terhadap wajib pajak guna untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan juga tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian yang belum digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Titis Wahyu, 2018 “ *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Pratama Cilacap pada tahun 2018*”, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Basri, Yesi mutia dkk, 2012 “*Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya(Kasus Padawajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratamatampun Pekanbaru)*”, diambil dari <http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/088-PPJK-19.pdf> diakses pada 25 Oktober 2018.
- Basri, Yesi Mutia, 2015 “*Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak*” Akuntabilitas, Vol. VIII 1, April.
- Caroko,Bayu Dkk, 2015“*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*” Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 1 No. 1 Januari.
- Dharma, Lasmia, 2016 “*Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak*” JOM Fekon, Vol.3 No.1 Februari.
- Ermawati, Nanik Dkk.“*Pengaruh Pengetahuanperpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*” Prosiding SENDI_U 2018 ISBN: 978-979-3649-99-3.
- Fitriandi, Primandita, dkk, 2014 “*Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*” Jakarta: salemba empat.

Fitri Septarini, Dina, 2015 “*Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Merauke*”, JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL, VOLUME VI NO. 1, APRIL.

Fikriningrum, Winda Kurnia, 2012, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*”, diambil dari <http://eprints.undip.ac.id/36149/1/FIKRININGRUM.pdf> diakses pada 24 Oktober 2018.

Fahmi, Hanifatun, “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan*” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016, diambil dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8464/Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y> diakses pada 1 juli 2019.

Ghozali, Imam, 2013 “*Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21*”, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/65204/camat-dan-kades-diminta-buka-layanan-pajak> diakses 23 Oktober 2018.

<http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak++realisasi+penerimaan+pajak+baru+31%25> diakses 25 Oktober 2018.

[https://www.researchgate.net/publication/289657773 Teknik Sampling dan Penentuan Jumlah sampel/download](https://www.researchgate.net/publication/289657773_Teknik_Sampling_dan_Penentuan_Jumlah_sampel/download) diakses 30 Oktober 2018.

<https://jateng.antaranews.com/berita/193498/kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus-capai-8856-persen> di akses 20 maret 2018.

- Iredho Fani Reza, 2013 *“Hubungan Antara Religiusitas Dengan Moralitas Pada Remaja Di Madrasah Aliyah (Ma)”* Humanitas, Vol. X No.2 Agustus.
- Kristin, Ari, P, 2012 *“Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor Dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia)”*, Volume II / Edisi 2/ Nopember, Jurnal Economica.
- Kusuma Wardani, Dewi dan Rumiya, *“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)”* JURNAL AKUNTANSI VOL. 5 NO. 1 JUNI 2017.
- Linatu, Amina, 2013 *“Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Pph 21 Terhadap Penerimaan Pph 21 Pada Kpp Pratama Manado”* Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni.
- Mardiasmo, 2016 *“perpajakan edisi terbaru 2016”* Yogyakarta, C.V ANDI OFSFSET,
- Marta Ardi, Devi dkk, *“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta”*, Journal of Economic and Economic Education Vol.4 No.2 (177 -191)
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah, 2010 *“Metode Penelitian”*, Yogyakarta, C.V ANDI OFFSET.
- Martono, Nanang, 2012 *“Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder”*, Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Monita Pantreysih Dauhan Dkk, 2015 *“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan*

Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung)”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04.

Nazir, Moh, 2017 “metode penelitian”Ghalia Indonesia, Bogor.

Oktaviane Lidya Winerungan, 2013 “*Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*” Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September.

Patmasari, Eken, dkk “*Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri*” Seminar Nasional IENACO – 2016 ISSN: 2337 – 4349.

Pandiangnan, Liberti, 2014 “ *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*” Erlangga.

Puspa, Arum Harjanti, 2012, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap)*” diambil dari http://eprints.undip.ac.id/35890/1/SKRIPSI_ARUM.pdf diakses pada 25 Oktober 2018.

Rommy Susherdianto, Haryanto, 2012 “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wpop Yang Memiliki Usaha Di Kota Kudus)*”, DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 1, Nomor 1.

Resmi, Siti, 2017 “*Perpajakan Teori dan Kasus*” Jakarta, Salemba Empat.

Susilawati, Ketut Evi Dkk, 2014 “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan*

Bermotor” ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

Setiyowati, Yuni “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014*” Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2017.

Saraswati, Anggun Kurnia, 2012, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*” diambil dari <https://core.ac.uk/download/pdf/11734393.pdf> diakses pada 24 Oktober 2018.

Sarjono, Haryadi dan Julianita, Winda, 2011 “*SPSS vs LISREL*”, Jakarta, Salemba Empat.

Sugiyono, 2016 “*metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*” Bandung, Alfabeta cv.

Waluyo, 2005 “*Perpajakan Indonesia*” Jakarta, Salemba Empat.

Tahar, Afrizal dan Kartika, Armain, Rachman, 2014 “*Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” Jurnal Akuntansi Vol. 15 NO. 1 Januari.

Triastuti RJ, Farieda dkk “*Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk Dan Promosi Penjualan Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen (Studi Pada Buket Koffee+Jazz Semarang)*” *DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT* Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-13.

Utama, Andhika. 2016 “*Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*” Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi 3 No. 2, Apr – Jun, p.01 – 13 ISSN: 2355-4118

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yukha Ilaiyyah

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 01 November 1997

Jenis Kelamin: : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dk. Jati RT 002 RW 003, Desa Medini,
Kecamatan Gajah
Kabupaten Demak

No. HP : 081393997633

E-mail : yukailayya@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Medini Gajah Demak (2003-2009)
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Huda (2009-2012)
3. Madrasah Aliyah (MA) NU Nurul Ulum Jekulo Kudus (2012-2015)

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth

Saudara / i Wajib Pajak

Di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sebagai syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo Semarang. Peneliti melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21”** (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus).

Dengan ini memohon kesediaan saudara untuk mengisi kuesioner ini dengan memberikan informasi pada masing-masing pernyataan berikut ini dengan sebenar-benarnya dan jujur sesuai petunjuk pengisian. Jawaban yang saudara berikan ini akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Data

yang saudara berikan hanya untuk kepentingan penelitian dan tidak untuk di publikasikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya dalam pengisian koesioner ini saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Peneliti

Yukha ilaiyyah

• **PETUNJUK PENGISIAN**

1. Mohon bantuan saudara / i untuk menjawab pernyataan yang ada dengan jujur.
2. Berilah tanda silang (X) untuk data responden dan data cheklist (√) untuk kuesioner dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Saudara / i cukup menjawab sesuai yang Saudara / i alami dan rasakan dalam menjalankan kewajiban.
4. Keterangan pengisian:
SS = Sangat Setuju (5)
S = Setuju (4)
N = Netral (3)
TS = Tidak Setuju (2)
STS = Sangat Tidak Setuju (1)

5. Mohon periksa kembali semua jawaban Saudara / i dan yakinkan bahwa tidak ada pernyataan yang terlewatkan.

• **DATA RESPONDEN**

1. No responden : (diisi oleh peneliti)
2. Nama : (boleh tidak diisi)
3. Jenis kelami :

☐ Perempuan

☐ Laki Laki

4. Usia :

☐ 20-30 Tahun

☐ 41-50 Tahun

☐ 31-40 Tahun

☐ > 50 Tahun

5. Tingkat Pendidikan :

☐ SMA/ Sederajat ☐ S1

☐ D3

☐ S2

☐ Lainnya

• **Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No	Pernyataan	SS 5	S 4	N 3	TS 2	ST S 1
1	Saya menyampaikan SPT tepat pada waktunya					
2	Saya mengisi formulir SPT dengan benar					
3	Saya mengisi formulir SPT dengan lengkap					
4	Saya mengisi formulir SPT dengan jelas					

• **Tingkat Pengetahuan Perpajakan (XI)**

No	Pernyataan	SS 5	S 4	N 3	TS 2	ST S 1
1	Saya memahami definisi pajak					
2	Saya mengetahui fungsi pajak					
3	Saya mengetahui jenis-jenis pajak					
4	Saya dapat menghitung tarif pajak					

- **Sanksi (X2)**

No	Pernyataan	SS 5	S 4	N 3	TS 2	STS 1
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran					
3	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan					
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku					

- **Religiusitas (X3)**

N o	Pernyataan	SS 5	S 4	N 3	TS 2	ST S 1
1	Agama sangat penting dalam hidup saya					
2	Saya selalu taat beribadah					
3	Saya yakin dan patuh terhadap pemimpin agama saya					
4	Saya sering berperilaku baik terhadap sesama manusia					

Lampiran 2

Dokumentasi





Lampiran 3

Jawaban Responden terhadap Masing-Masing Item Pernyataan

1. Kepatuhan wajib pajak (Y)

NO	Y. 1	Y. 2	Y. 3	Y. 4	kepatuhan wajib pajak
1	4	4	5	4	17
2	5	5	4	4	18
3	4	4	3	3	14
4	4	4	3	4	15
5	5	5	4	4	18
6	4	4	4	4	16
7	4	3	4	3	14
8	4	4	4	3	15
9	4	3	4	4	15
10	4	4	5	3	16
11	4	4	3	3	14
12	4	4	5	4	17
13	5	4	5	4	18
14	5	3	3	4	15
15	4	4	4	4	16
16	4	4	4	4	16
17	5	4	3	3	15
18	4	4	4	4	16
19	4	4	4	4	16
20	5	3	3	4	15
21	5	4	4	4	17

22	4	4	5	4	17
23	4	4	3	3	14
24	4	4	4	4	16
25	5	5	4	4	18
26	3	2	2	3	10
27	4	4	4	4	16
28	3	3	4	4	14
29	5	4	4	4	17
30	4	4	4	4	16
31	4	4	3	3	14
32	4	5	4	4	17
33	5	3	3	4	15
34	5	4	4	5	18
35	4	5	5	5	19
36	2	2	2	2	8
37	4	3	3	4	14
38	4	5	4	4	17
39	4	5	5	5	19
40	5	5	4	4	18
41	3	3	4	4	14
42	4	4	3	4	15
43	4	4	5	5	18
44	4	5	5	5	19
45	4	5	4	4	17
46	4	4	3	3	14
47	4	4	4	4	16
48	4	5	4	4	17
49	4	4	5	4	17
50	5	4	5	5	19
51	4	5	4	4	17

52	4	5	4	4	17
53	4	5	4	5	18
54	4	3	4	4	15
55	4	5	5	3	17
56	4	5	5	4	18
57	5	5	5	5	20
58	5	5	4	5	19
59	4	3	4	4	15
60	4	4	4	5	17
61	4	5	4	5	18
62	3	3	3	3	12
63	5	4	4	5	18
64	4	4	4	5	17
65	5	4	5	4	18
66	4	5	4	5	18
67	4	3	3	5	15
68	5	4	5	4	18
69	3	4	4	3	14
70	4	4	4	4	16
71	4	5	4	5	18
72	4	4	4	4	16
73	4	4	4	5	17
74	4	3	3	4	14
75	4	4	5	5	18

2. Tingkat pengetahuan perpajakan

NO	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	Tingkat Pengetahuan Perpajakan
1	4	4	5	4	17
2	4	3	3	4	14
3	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	16
5	5	5	4	4	18
6	4	3	3	4	14
7	4	4	4	3	15
8	3	4	4	5	16
9	4	4	4	4	16
10	4	4	5	5	18
11	4	4	3	4	15
12	4	4	5	4	17
13	5	4	5	4	18
14	5	4	5	4	18
15	4	4	3	3	14
16	3	2	2	3	10
17	5	4	4	3	16
18	4	4	3	3	14
19	4	4	4	4	16
20	5	3	3	4	15
21	5	4	4	4	17
22	4	4	5	4	17
23	4	4	3	3	14
24	4	4	4	4	16
25	5	5	4	4	18
26	4	4	3	3	14

27	4	4	4	4	16
28	3	3	4	4	14
29	5	4	4	4	17
30	4	4	4	4	16
31	4	4	4	4	16
32	4	5	4	4	17
33	5	5	5	5	20
34	5	4	4	5	18
35	4	5	5	5	19
36	5	4	4	4	17
37	4	4	4	4	16
38	4	5	4	4	17
39	4	5	5	5	19
40	5	5	4	4	18
41	3	3	4	4	14
42	4	5	5	5	19
43	4	4	5	5	18
44	2	2	2	2	8
45	4	5	4	4	17
46	4	4	4	4	16
47	3	2	2	3	10
48	4	5	4	5	18
49	4	4	5	4	17
50	5	5	5	5	20
51	3	2	2	3	10
52	4	5	4	4	17
53	4	5	4	5	18
54	4	5	5	4	18
55	4	5	4	4	17
56	4	5	5	4	18

57	5	4	4	4	17
58	5	5	4	4	18
59	4	4	4	4	16
60	5	5	4	4	18
61	4	5	4	4	17
62	3	3	3	3	12
63	5	4	4	4	17
64	4	3	3	4	14
65	5	4	5	4	18
66	4	5	4	4	17
67	4	3	3	4	14
68	5	4	5	4	18
69	5	5	5	5	20
70	4	3	3	4	14
71	4	5	4	4	17
72	4	3	3	5	15
73	4	5	5	4	18
74	4	3	3	4	14
75	4	4	5	5	18

3. Sanksi

NO	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	SANKSI
1	4	4	4	4	16
2	4	4	4	5	17
3	4	4	4	4	16
4	4	5	4	5	18
5	4	4	4	4	16
6	5	4	4	4	17
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	4	16
9	2	2	2	2	8
10	4	4	4	4	16
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	4	16
13	5	5	5	5	20
14	4	4	4	4	16
15	4	4	4	4	16
16	4	4	4	5	17
17	4	4	4	4	16
18	4	5	4	4	17
19	4	3	3	5	15
20	4	4	4	4	16
21	5	4	4	4	17
22	5	4	4	4	17
23	5	4	4	4	17
24	4	4	4	4	16

25	4	4	4	4	16
26	3	3	3	3	12
27	4	4	4	5	17
28	5	4	4	4	17
29	3	3	3	3	12
30	4	4	4	4	16
31	3	3	3	3	12
32	3	3	3	3	12
33	3	3	3	3	12
34	3	3	3	3	12
35	4	5	5	4	18
36	4	4	4	4	16
37	4	3	3	4	14
38	4	5	4	4	17
39	4	5	5	5	19
40	5	5	3	3	16
41	3	3	4	4	14
42	4	4	3	4	15
43	4	4	5	4	17
44	4	5	5	4	18
45	4	5	4	5	18
46	4	4	3	4	15
47	4	4	4	4	16
48	3	3	3	3	12
49	4	4	5	5	18
50	5	4	5	4	18
51	4	5	4	3	16
52	4	5	4	5	18
53	4	5	4	5	18
54	4	3	4	4	15

55	4	5	5	4	18
56	3	3	3	3	12
57	5	5	5	4	19
58	5	5	4	5	19
59	3	3	3	3	12
60	4	4	4	4	16
61	4	5	4	5	18
62	3	3	3	3	12
63	5	4	4	4	17
64	4	4	4	4	16
65	4	4	4	4	16
66	4	5	4	3	16
67	4	3	3	4	14
68	5	4	5	4	18
69	3	3	3	3	12
70	4	4	4	5	17
71	3	3	3	3	12
72	4	4	4	5	17
73	4	4	4	5	17
74	4	3	3	4	14
75	4	4	5	3	16

4. Religiusitas

NO	X3. 1	X3. 2	X3. 3	X3. 4	Religiusitas
1	4	5	3	4	16
2	4	4	5	5	18
3	3	4	3	4	14
4	4	4	3	3	14
5	3	4	3	4	14
6	5	4	4	4	17
7	4	3	3	4	14
8	4	4	3	3	14
9	5	5	4	4	18
10	3	3	3	3	12
11	3	4	4	4	15
12	2	2	2	2	8
13	4	4	4	5	17
14	4	4	4	4	16
15	3	5	5	4	17
16	4	3	3	5	15
17	3	3	4	4	14
18	5	5	4	4	18
19	4	5	4	5	18
20	4	3	3	3	13
21	5	3	4	3	15
22	3	5	3	4	15
23	3	4	3	4	14
24	4	4	4	4	16
25	4	4	4	4	16
26	3	3	3	5	14
27	4	5	4	5	18
28	5	5	4	4	18
29	4	3	3	3	13
30	3	4	3	4	14
31	4	4	4	4	16
32	4	5	4	5	18

33	4	5	4	5	18
34	4	5	5	5	19
35	4	5	5	4	18
36	4	4	4	4	16
37	4	4	4	4	16
38	5	5	5	4	19
39	4	5	4	5	18
40	5	5	4	4	18
41	2	2	2	2	8
42	4	4	4	4	16
43	4	5	4	5	18
44	5	5	4	5	19
45	5	4	5	5	19
46	4	4	4	4	16
47	4	4	4	4	16
48	4	5	5	5	19
49	4	5	4	5	18
50	5	4	4	4	17
51	4	4	4	5	17
52	4	4	5	5	18
53	5	4	5	4	18
54	4	5	5	4	18
55	4	4	5	5	18
56	4	5	4	5	18
57	5	5	5	5	20
58	4	4	4	5	17
59	5	5	4	4	18
60	5	5	4	4	18
61	3	3	3	3	12
62	4	4	4	4	16
63	4	4	4	4	16
64	4	4	4	4	16
65	4	5	4	5	18
66	4	4	4	5	17
67	5	4	5	4	18
68	4	4	4	4	16
69	5	4	5	4	18

70	5	5	4	5	19
71	4	4	5	5	18
72	4	4	5	5	18
73	4	4	4	4	16
74	4	4	4	4	16
75	4	4	5	5	18

Lampiran 4

Uji validitas dan Reliabelitas

Correlations

		Y. 1	Y. 2	Y. 3	Y. 4	kepatuhan wajib pajak
Y. 1	Pearson Correlation	1	.350**	.260*	.355**	.629**
	Sig. (2-tailed)		.002	.024	.002	.000
	N	75	75	75	75	75
Y. 2	Pearson Correlation	.350**	1	.517**	.389**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.002		.000	.001	.000
	N	75	75	75	75	75
Y. 3	Pearson Correlation	.260*	.517**	1	.458**	.778**
	Sig. (2-tailed)	.024	.000		.000	.000
	N	75	75	75	75	75
Y. 4	Pearson Correlation	.355**	.389**	.458**	1	.746**
	Sig. (2-tailed)	.002	.001	.000		.000
	N	75	75	75	75	75
kepatuhan wajib pajak	Pearson Correlation	.629**	.785**	.778**	.746**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y. 1	12.07	3.009	.403	.179	.714
Y. 2	12.16	2.325	.559	.330	.626
Y. 3	12.24	2.374	.555	.345	.629
Y. 4	12.17	2.551	.524	.283	.649

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.720	.717	4

Correlations

		X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	Tingkat Pengetahuan Perpajakan
X1. 1	Pearson Correlation	1	.499**	.451**	.339**	.697**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.003	.000
	N	75	75	75	75	75
X1. 2	Pearson Correlation	.499**	1	.679**	.475**	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75
X1. 3	Pearson Correlation	.451**	.679**	1	.617**	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	75	75	75	75	75
X1. 4	Pearson Correlation	.339**	.475**	.617**	1	.743**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000		.000
	N	75	75	75	75	75
Tingkat Pengetahuan Perpajakan	Pearson Correlation	.697**	.856**	.880**	.743**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1. 1	12.07	3.766	.511	.275	.808
X1. 2	12.15	2.803	.695	.510	.724
X1. 3	12.24	2.725	.742	.580	.697
X1. 4	12.19	3.667	.581	.389	.781

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2. 1	11.800	3.135	.689	.477	.805
X2. 2	11.800	2.757	.734	.560	.783
X2. 3	11.893	2.961	.720	.540	.790
X2. 4	11.787	3.089	.602	.364	.841

Correlations

		X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4	SANKSI
X2. 1	Pearson Correlation	1	.623**	.606**	.525**	.821**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75
X2. 2	Pearson Correlation	.623**	1	.690**	.533**	.865**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75
X2. 3	Pearson Correlation	.606**	.690**	1	.517**	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	75	75	75	75	75
X2. 4	Pearson Correlation	.525**	.533**	.517**	1	.781**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	75	75	75	75	75
SANKSI	Pearson Correlation	.821**	.865**	.847**	.781**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.808	.806	4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.847	.848	4

Correlations

		X3. 1	X3. 2	X3. 3	X3. 4	Religiusitas
X3. 1	Pearson Correlation	1	.487**	.556**	.311**	.739**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.007	.000
	N	75	75	75	75	75
X3. 2	Pearson Correlation	.487**	1	.504**	.561**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75
X3. 3	Pearson Correlation	.556**	.504**	1	.571**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	75	75	75	75	75
X3. 4	Pearson Correlation	.311**	.561**	.571**	1	.775**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000		.000
	N	75	75	75	75	75
Religiusitas	Pearson Correlation	.739**	.811**	.834**	.775**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3. 1	12.360	3.369	.542	.378	.782
X3. 2	12.213	3.035	.640	.428	.735
X3. 3	12.413	2.975	.681	.489	.715
X3. 4	12.173	3.199	.588	.437	.761

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.800	.799	4

Lampiran 5

Karakteristik responden

jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	40	53.3	53.3	53.3
	perempuan	35	46.7	46.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.0	19	25.3	25.3	25.3
	3.0	35	46.7	46.7	72.0
	4.0	21	28.0	28.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.0	9	12.0	12.0	12.0
	2.0	18	24.0	24.0	36.0
	3.0	48	64.0	64.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Lampiran 6

Analisis Statistik Deskriptif

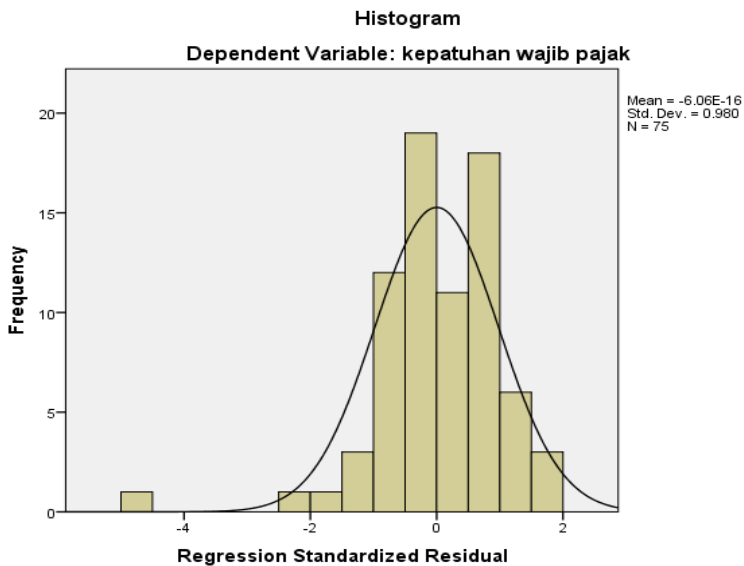
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kepatuhan wajib pajak	75	8.0	20.0	16.213	2.0421
Tingkat Pengetahuan Perpajakan	75	8.0	20.0	16.213	2.3267
SANKSI	75	8.0	20.0	15.760	2.2472
Religiusitas	75	8.0	20.0	16.387	2.2892
Valid N (listwise)	75				

Lampiran 7

Uji asumsi klasik

1. Uji Normalitas

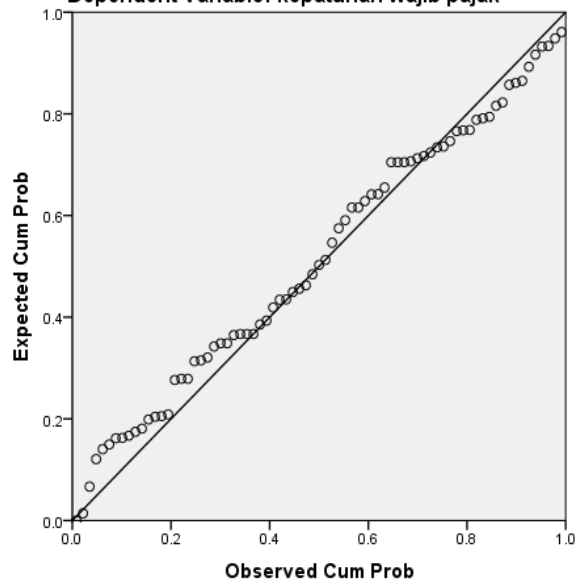


\
Pendekatan Histogram

Pendekatan Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak



Pendekatan Kolmogorov

2. Uji Multikolonieritas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.69516395
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.054
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tingkat Pengetahuan Perpajakan	.988	1.013
	SANKSI	.999	1.001
	Religiusitas	.987	1.013

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

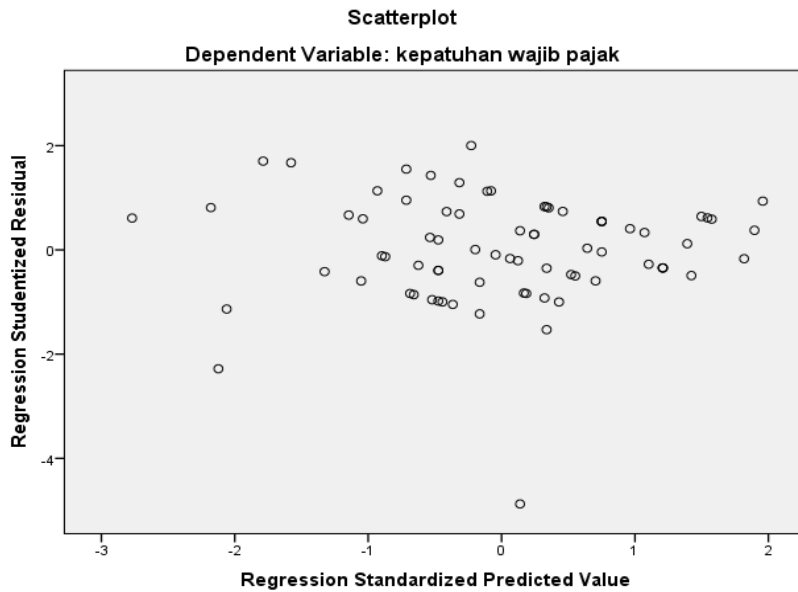
3. Uji Heteroskedasititas

Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4.465	1.529		2.920
	Tingkat Pengetahuan Perpajakan	-.041	.056	-.084	-.727
	SANKSI	-.111	.058	-.219	-1.915
	Religiusitas	-.049	.057	-.099	-.862

a. Dependent Variable: RES_2

Uji Scatterplot



Lampiran 8

Pengujian Hipotesis

1. Uji koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.558 ^a	.311	.282	1.7306

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, SANKSI, Tingkat Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95.942	3	31.981	10.678	.000 ^b
	Residual	212.645	71	2.995		
	Total	308.587	74			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Religiusitas, SANKSI, Tingkat Pengetahuan Perpajakan

2. Uji Simultan (Uji F)

3. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.072	2.369		1.297	.199
Tingkat Pengetahuan Perpajakan	.209	.087	.238	2.401	.019
SANKSI	.365	.090	.402	4.075	.000
Religiusitas	.244	.088	.274	2.763	.007

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Lampiran 9



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS

JALAN NITI SEMITO KUDUS 59312
TELEPON (0291) 432046, 432047; FAKSIMILE (0291) 432048 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1560/WPJ.10/KP.08/2019
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Ijin Penelitian
a.n. Yukha Ilaiyah

23 Mei 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan
Semarang 50185

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-1379/10.5/D1/TL.00/05/2019 Tanggal 06 Mei 2019 Hal Surat Pengantar Izin Riset, atas:

Nama : Yukha Ilaiyah
NIM : 1505046015
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi PPh 21.

dengan ini memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Kudus, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat untuk keperluan akademis yang tidak dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan *soft-copy* dan satu *hard-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id. *Hardcopy* dimaksud dikirim ke alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, Jalan Niti Semito Kudus.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor,



Bernadette N.D. Prananingrum